

# Burkina Faso's military strategy faces extremism: Implications for Indonesia

Faonaso Harefa<sup>1</sup>, Cecilia F. Harsono<sup>2</sup>

<sup>1),2)</sup> Universitas Pertahanan, Matraman, Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia

Article Info	Abstrak
<p><i>Article history</i></p> <p>Received : Jul 09 2025            Revised : Jul 18, 2025            Accepted : Jul 24, 2025</p>	<p><i>Penelitian ini dilandasi kebutuhan memahami strategi militer Burkina Faso dalam menghadapi ekstremisme pascakudeta militer tahun 2022, dan relevansinya sebagai bahan pembelajaran bagi Indonesia. Meskipun memiliki perbedaan konteks geografis dan politik, Indonesia tetap menghadapi potensi munculnya kembali kelompok ekstremisme, terutama di wilayah yang pernah menjadi pusat aktivitas radikal. Hasil penelitian, ditemukan bahwa aspek militer, stabilitas politik, dan penguasaan wilayah merupakan titik krusial yang menunjukkan kelemahan signifikan dalam sistem keamanan Burkina Faso dan keterlibatan aktor eksternal Rusia yang memanfaatkan kekosongan pengaruh Barat di kawasan Sahel. Pendekatan respons yang bersifat sektoral dan terlalu menekankan pada kekuatan militer terbukti tidak memadai dalam merespons dinamika ancaman ekstremisme yang kompleks dan transnasional. Penggunaan kerangka DIME-PMESII dalam penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif terkait kondisi internal dan kapasitas respons negara, dengan mengidentifikasi ketimpangan antara urgensi ancaman dan kesiapan sektor strategis. Sementara itu, metode forecasting berbasis pembobotan memperkuat kapasitas prediktif dalam perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berbasis bukti dan responsif terhadap dinamika jangka menengah hingga panjang. Bagi Indonesia, temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sistem keamanan nasional secara multidimensional. Fokus perlu diarahkan pada pengembangan sistem deteksi dini, pengelolaan wilayah perbatasan, dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam rangka mencegah berkembangnya ekstremisme. Pendekatan ini relevan dengan penerapan Complex Adaptive Systems Theory, National Resilience Theory, dan Human Security Theory, yang menempatkan kesejahteraan dan perlindungan warga negara sebagai bagian integral dari sistem pertahanan. Kasus Burkina Faso, Indonesia dapat merumuskan strategi yang lebih komprehensif dan adaptif dalam menghadapi ancaman ideologis transnasional.</i></p>
<p><b>Keywords:</b></p> <p><i>Adaptive Systems;            DIME-PMESII;            National Security;            Policy Strategic; and            Transnational Extremism</i></p>	<p><b>Abstract</b></p> <p><i>This research is based on the need to understand the Burkina Faso military strategy in dealing with post-military extremism in 2022 and its relevance as learning material for Indonesia. Despite having differences in geographical and political contexts, Indonesia still faces the potential for the re-emergence of extremist groups, especially in areas that have been the center of radical activity. The results showed that military aspects, political stability, and regional control are crucial points that show significant weaknesses in the Burkina Faso security system and the involvement of Russian external actors who utilize the emptiness of Western influences in the Sahel region. The response approach that is sectoral and too emphasizing that military power has proven to be inadequate in responding to the dynamics of complex and transnational extremism threats. The use of the framework of dimmesii in this study provides a comprehensive picture related to the internal conditions and the capacity of the state response by identifying inequality between the urgency of the threat and the readiness of the strategic sector. Meanwhile, the weight-based forecasting method strengthens predictive capacity in the formulation of policies so that the policies produced are more based on evidence and responsiveness to the dynamics of medium to long to long. The focus needs to be directed at the development of an early detection system, management of border areas, and increasing coordination between related institutions in order to prevent the development of extremism. This approach is relevant to the application of Complex Adaptive Systems Theory, National Resilience Theory, and Human Security Theory, which places the welfare and protection of citizens as an integral part of the defense system. The Burkina Faso case, Indonesia can formulate a more comprehensive and adaptive strategy in dealing with transnational ideological threats.</i></p>

**Corresponding Author:**



## PENDAHULUAN

Strategi militer Burkina Faso adalah serangkaian kebijakan dan tindakan pertahanan yang dirancang untuk menghadapi ancaman ekstremisme bersenjata, dengan tujuan menjaga stabilitas nasional dan keamanan kawasan (Governance et al., 2024). Sejak tahun 2015, Burkina Faso mengalami peningkatan signifikan dalam serangan ekstremis yang dilakukan oleh kelompok afiliasi Al-Qaida seperti *Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin* (JNIM) dan kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), khususnya melalui cabangnya di wilayah Sahel, yaitu *Islamic State in the Greater Sahara* (ISGS) (Krause, 2022). Beroperasi di dalam wilayah Burkina Faso (Svetlana Bokeriya, 2023). Peningkatan serangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya kontrol pemerintahan di wilayah perbatasan negara-negara kawasan Sahel, kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang terpinggirkan, serta penyebaran pengaruh ideologi radikal dari kelompok bersenjata lintas negara (Issaev et al., 2022). Negara-negara yang termasuk dalam kawasan Sahel meliputi Burkina Faso, Mali, Niger, Chad, dan Mauritania, serta sebagian wilayah dari Senegal, Nigeria bagian utara, Sudan bagian barat, dan Eritrea (Fitton-brown, 2024). Kawasan ini membentang di antara Gurun Sahara di utara dan sabana Sudan di selatan, dikenal memiliki iklim semi-kering, kerentanan terhadap konflik, dan merupakan salah satu lokasi utama aktivitas kelompok ekstremis bersenjata di Afrika (HARUNA, 2022).

Pada tahun 2023, Burkina Faso tercatat sebagai negara dengan jumlah korban jiwa akibat terorisme tertinggi di antara negara-negara kawasan Sahel, dengan lebih dari 7.600 kematian, meskipun jumlah serangan tercatat menurun (Cengiz & Karademir, 2020). Namun, intensitas dan dampak dari serangan tersebut justru semakin meningkat, terutama pada periode 2024–2025 (Bacon & Warner, 2021). Beberapa peristiwa berdarah yang menonjol antara lain pembantaian terhadap warga sipil di Barsalougho yang menewaskan sedikitnya 133 orang serta serangan terhadap pangkalan militer di Diapaga yang menyebabkan lebih dari 60 korban jiwa dari kalangan tentara dan milisi sukarelawan (Safoa, 2020). Dalam situasi ini, wilayah yang masih berada di bawah kendali pemerintah diperkirakan menyusut drastis, hanya mencakup sekitar 40–60 persen dari total wilayah nasional, sementara kelompok militan berhasil mendominasi sebagian besar daerah pedalaman yang terpencil (Governance et al., 2024).

Negara Burkina Faso secara konstitusional menganut sistem pemerintahan republik dengan bentuk negara kesatuan dan sistem presidensial yang mengedepankan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Vohito, 2021). Namun, sejak terjadinya kudeta militer pada tahun 2022, sistem pemerintahan demokratis tersebut ditangguhkan dan digantikan oleh rezim militer sementara yang dipimpin oleh Kapten Ibrahim Traoré (Asante, 2021). Kudeta militer di Burkina Faso tersebut karena ketidakpuasan terhadap kegagalan pemerintah sipil dalam mengatasi meningkatnya ancaman ekstremisme dan ketidakstabilan keamanan di negara tersebut (Engels, 2022). Akibatnya, kekuasaan eksekutif saat ini berada di tangan de facto pemerintahan militer, bukan lagi pemerintahan sipil yang dipilih melalui proses demokrasi (G. S. & O. C., 2024). Pemerintah transisi militer tersebut menjanjikan pemulihan tatanan demokrasi setelah situasi keamanan dinyatakan stabil (Olukayode, 2022). Sebagai bagian dari respons terhadap memburuknya keamanan nasional dan regional, pemerintah militer Burkina Faso telah membentuk aliansi militer kawasan yang dikenal sebagai Alliance of Sahel States bersama Mali dan Niger, serta menjalin kerja sama strategis dengan kekuatan asing seperti Rusia dalam upaya memperkuat kapasitas pertahanan dan operasi kontra-ekstremisme di wilayah tersebut. Fenomena meningkatnya ekstremisme kekerasan di Burkina Faso tidak hanya mencerminkan kegagalan internal negara dalam menanggulangi ancaman dari aktor non-negara, tetapi juga merefleksikan tren global baru di mana kawasan-kawasan rapuh menjadi medan subur bagi ekspansi jaringan terorisme transnasional (Louw, 2022). Dominasi kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Al-Qaida dan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di sebagian besar wilayah pedalaman, disertai dengan merosotnya kendali teritorial pemerintah yang kini diperkirakan hanya mencakup 40–60 persen

dari total wilayah nasional, menjadikan Burkina Faso sebagai studi kasus penting dalam memahami bagaimana sebuah negara menghadapi kehancuran struktur keamanan konvensional dan menavigasi respons strategis melalui pendekatan militeristik (Moseley & Ouedraogo, 2022).

Urgensi penelitian ini semakin menguat seiring dengan dinamika geopolitik di kawasan Sahel, khususnya pasca pembentukan *Alliance of Sahel States* yang mencerminkan munculnya tatanan keamanan alternatif di luar dominasi negara-negara Barat (Charbonneau, 2021). Kudeta militer di Burkina Faso pada tahun 2022, yang dipicu oleh kegagalan pemerintah sipil dalam mengatasi ancaman ekstremisme, membuka jalan bagi keterlibatan aktor eksternal seperti Rusia yang kini menggantikan peran Barat melalui dukungan militer, diplomasi, dan strategi pengaruh (Osuchukwu, 2025). Keterlibatan Rusia semakin intensif dengan kehadiran sekitar 100 personel militer dari unit *Africa Corps* pada Januari 2024 sebagai pengganti *Wagner Group*, serta dukungan terbuka dari Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov pada April 2025 untuk membentuk kekuatan militer regional di Sahel (Kipo-Sunyehzi & Lambon, 2025). Kehadiran Rusia, yang menawarkan bantuan militer tanpa prasyarat politik, bukan hanya mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Prancis dan Amerika Serikat, tetapi juga membuka akses ke sumber daya strategis seperti emas dan uranium, serta memperluas pengaruhnya melalui diplomasi, media, dan narasi anti Barat. Pembentukan *Alliance of Sahel States* (AES), khususnya melalui strategi militer yang diadopsi oleh Burkina Faso dalam menghadapi kelompok ekstremis, mencerminkan upaya serius negara-negara di kawasan Sahel untuk membangun arsitektur keamanan mandiri seiring menurunnya keterlibatan dan dukungan dari kekuatan asing, seperti Prancis. Meskipun AES tampak sebagai respons strategis jangka panjang, keberlanjutannya sangat bergantung pada stabilitas politik domestik, kapasitas kelembagaan, serta kemampuan negara-negara anggotanya dalam mengatasi akar permasalahan ekstremisme, seperti kemiskinan, marginalisasi sosial, dan lemahnya tata kelola pemerintahan lokal. Bagi Indonesia, dinamika yang terjadi di Burkina Faso menjadi pelajaran penting bahwa penyelesaian terhadap ancaman ekstremisme tidak dapat diserahkan semata-mata kepada pendekatan militer. Strategi yang terlalu menitikberatkan pada kekuatan bersenjata hanya akan menghasilkan solusi parsial dan berisiko menimbulkan siklus kekerasan baru. Oleh karena itu, pendekatan militer perlu diimbangi dengan kebijakan deradikalisasi, penguatan pendidikan ideologis, pembangunan wilayah terpencil, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses pencegahan dan penanggulangan ekstremisme. Pendekatan yang holistik dan berbasis inklusi sosial inilah yang dapat menjadi landasan strategis yang lebih berkelanjutan dalam menjaga stabilitas nasional dan mencegah berkembangnya ideologi radikal di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi militer Burkina Faso dalam menghadapi ancaman ekstremisme bersenjata di kawasan Afrika Barat, serta menganalisis implikasinya terhadap penguatan kebijakan pertahanan Indonesia dalam menanggulangi potensi radikalisme dan terorisme di dalam negeri.

## METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, desain Forecasting adalah proses memprediksi kejadian di masa depan berdasarkan data, tren, atau informasi yang ada saat ini. Teknik pengumpulan didapatkan dari data sekunder seperti artikel ilmiah, dokumen, website dan media online yang relevan. Teknik analisis data menggunakan kerangka strategis DIME (Diplomacy, Information, Military, Economic) dan PMESII (Political, Military, Economic, Social, Information, Infrastructure), yang selanjutnya dioperasionalkan ke dalam skala Likert 1–5 untuk menilai tingkat urgensi dan kapabilitas setiap dimensi (Ausseil et al., 2020). Proses analisis terdiri dari enam tahapan: (1) penetapan tujuan penelitian; (2) identifikasi dimensi dan indikator terkait; (3) pembobotan numerik masing-masing komponen; (4) integrasi hasil pembobotan DIME dan PMESII dalam satu matriks analitis; (5) evaluasi kesenjangan (gap) antara urgensi ancaman dan kapabilitas respons; dan (6) visualisasi temuan melalui grafik heatmap, radar chart, dan tabel rangkuman.

Dasar pembobotan DIME–PMESII penting karena mampu membedakan antara tingkat ancaman (*urgensi*) dan kapasitas respons negara (kapabilitas) dalam menghadapi tekanan strategis seperti militer, ekonomi, atau informasi. Pendekatan DIME–PMESII, mewakili kompleksitas sistem strategi nasional, di mana “DIME menggambarkan alat kekuatan nasional dan PMESII menunjukkan lingkungan strategis yang terdampak”. Penentuan skor untuk masing-masing dimensi, analisis gap dapat dilakukan untuk mengidentifikasi area prioritas yang membutuhkan penguatan, sehingga mendukung pengambilan keputusan strategis yang berbasis data dan efisiensi alokasi sumber daya. Metode pembobotan DIME–PMESII merupakan pengembangan dari kerangka kerja strategis yang

digunakan dalam doktrin militer dan intelijen AS, terutama dikembangkan oleh lembaga seperti Department of Defense (DoD), Research and Development Corporation (Rand Corporation), dan berbagai pusat kajian strategis internasional. Pembobotan dalam DIME-PMESII ditentukan sendiri oleh analis, berdasarkan; penilaian kontekstual terhadap situasi strategis (misalnya: ancaman regional, tekanan diplomatik, dan kekuatan ekonomi saingan); Data kuantitatif meliputi; laporan kebijakan, kekuatan militer, performa ekonomi, dan indeks persepsi global; dan Diskresi profesional analis atau tim ahli, seperti dalam doktrin militer, kajian intelijen, atau penelitian akademik.

Pemilihan metode kuantitatif dengan desain forecasting dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh proyeksi yang terukur mengenai efektivitas strategi militer Burkina Faso dalam menangani ekstremisme, serta dampaknya terhadap dinamika keamanan di kawasan Afrika Barat, Amerika, dan Indonesia. Penerapan kerangka analisis DIME-PMESII yang dioperasionalkan ke dalam skala Likert 1-5 memungkinkan penilaian kuantitatif terhadap tingkat urgensi ancaman dan kapabilitas respons pada setiap dimensi strategis. Validitas data diperkuat melalui penggunaan sumber sekunder yang dapat diverifikasi, seperti artikel ilmiah terindeks, laporan kebijakan resmi, dan data digital dari situs institusi terpercaya. Selain itu, proses pembobotan mengikuti praktik analisis berbasis doktrin strategis yang digunakan oleh lembaga seperti RAND Corporation dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, sehingga menghasilkan keluaran yang metodologis dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan pertahanan di level nasional dan kawasan.

Pada penelitian ini yang menjadi landasan teori meliputi; 1) Complex Adaptive Systems Theory. Menegaskan bahwa Ancaman ekstremisme yang berbasis ideologi transnasional beroperasi dalam ekosistem kompleks dan adaptif. Teori ini menekankan bahwa dalam menghadapi ancaman yang tidak linier, negara memerlukan pendekatan sistemik yang fleksibel dan adaptif sejalan dengan penggunaan kerangka PMESII (Political, Military, Economic, Social, Information, Infrastructure) (Notarnicola et al., 2024); 2) Kerangka DIME-PMESII sebagai Alat Analisis Strategis. Kerangka DIME (Diplomatic, Information, Military, Economic) dan PMESII dipakai untuk menganalisis elemen-elemen kekuatan nasional serta dinamika lingkungan strategis. Hal ini sangat penting untuk menyusun respons komprehensif terhadap ancaman ideologis lintas negara seperti ekstremisme (Sharpe et al., 2025); 3) Teori Forecasting Strategis dan Analisis Skenario. Forecasting berbasis pembobotan dan analisis skenario digunakan untuk memproyeksikan berbagai kemungkinan masa depan. Ini berguna untuk kebijakan berbasis data dalam menghadapi ketidakpastian ancaman keamanan (Barnea & Meshulach, 2021); 4) National Resilience Theory. Ketahanan sosial dan ekonomi menjadi elemen kunci dalam menjaga keutuhan negara dari ancaman ideologis. Teori ini mendorong pemikiran lintas sektor dalam membangun sistem pertahanan non-militer yang kuat, termasuk ketahanan komunitas (Kimhi & Eshel, 2019); dan 5) Human Security Theory. Pendekatan keamanan yang hanya mengandalkan kekuatan militer tidak memadai untuk menghadapi ekstremisme berbasis ideologi. Diperlukan integrasi dengan pendekatan pembangunan manusia yang berkelanjutan memastikan inklusivitas, keadilan sosial, dan ekonomi (Kipo-Sunyezi & Lambon, 2025). Penelitian ini dilaksanakan di Kampus Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia, pada bulan Juli 2025.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peta negara Burkina Faso



Gambar 1. Peta negara Burkina Faso  
 Sumber: Website (2025)

Gambar di atas merupakan peta negara Burkina Faso, sebuah negara yang terletak di kawasan Afrika Barat dan tidak memiliki garis pantai (landlocked) karena seluruh wilayahnya dikelilingi oleh negara-negara lain tanpa akses langsung ke laut, menjadikannya sepenuhnya terkurung daratan. Burkina Faso berbatasan dengan Negara Mali di sebelah utara dan barat laut, Negara Niger di timur laut, Benin di sebelah tenggara, dan Togo, Ghana, dan Pantai Gading (Côte d'Ivoire) di sebelah selatan dan barat daya. Ibu kota negara ini adalah Ouagadougou yang terletak di bagian tengah, berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, serta aktivitas militer. Secara geografis, wilayah utara Burkina Faso didominasi oleh kawasan semi gurun yang termasuk dalam sabuk Sahel, menjadikannya sangat rentan terhadap infiltrasi kelompok ekstremis bersenjata lintas batas dari Mali dan Niger. Sungai-sungai utama seperti Niger River, White Volta, Black Volta, dan Sirba River juga melintasi wilayah ini dan menjadi elemen geografis penting dalam pergerakan logistik dan personel.

Tabel 1. Pembobotan DIME-PMESII: Analisis Strategis Kasus Burkina Faso

Aspek	Subdimensi	Fakta dan Data Terkait (Burkina Faso)	Pembobotan (1-5)	Keterangan
Diplomacy	Hubungan luar negeri	Meningkatkan hubungan dengan Rusia; menjauh dari kekuatan Barat; pembentukan <i>Alliance of Sahel States</i>	4	Strategi diplomatik berorientasi ke Timur; pencarian alternatif dukungan internasional.
	Keterlibatan organisasi internasional	Minim keterlibatan aktif dari PBB/AU; dominasi pengaruh bilateral (Rusia, sebelumnya Prancis/AS)	2	Diplomasi regional terbatas, tidak mengandalkan forum multilateral secara penuh.
Information	Operasi informasi dan pengaruh media	Rusia menjalankan kampanye naratif pro-militer melalui media sosial dan video viral untuk dukung Traoré	4	Operasi informasi aktif dilakukan oleh aktor eksternal untuk memengaruhi opini domestik.
	Akses informasi publik	Pemerintah militer mengontrol narasi; keterbukaan informasi terbatas	3	Media cenderung dikendalikan untuk kepentingan stabilitas junta.
Military	Kekuatan dan struktur militer	Serangan ekstremis tinggi; kontrol wilayah tinggal 40-60%; militer dibantu personel Rusia	4	Militer aktif namun sangat tergantung pada bantuan eksternal; ancaman non-negara sangat tinggi.
	Stabilitas keamanan dalam negeri	Dominasi kelompok militan di pedalaman; wilayah negara tidak sepenuhnya dikuasai	5	Stabilitas nasional sangat terancam; situasi mendekati status negara gagal ( <i>fragile state</i> ).
Economy	Ketahanan	Krisis ekonomi diperparah	2	Potensi ekonomi besar,

	ekonomi dan pengelolaan sumber daya	oleh konflik; Rusia menunjukkan minat atas uranium dan emas		tetapi eksploitasi dan distribusinya dikuasai aktor eksternal dan konflik. Legitimasinya rendah secara internasional, namun dipertahankan oleh kekuatan militer domestik.
Political	Legitimasi pemerintahan	Pemerintahan hasil kudeta; pemerintahan sipil ditangguhkan sejak 2022	2	
Social	Stabilitas sosial dan integrasi komunitas	Masyarakat sipil terpapar ekstremisme; serangan berdarah terhadap warga sipil seperti di Barsalogo (133 tewas)	5	Ketegangan sosial tinggi; integrasi sosial terganggu oleh konflik dan radikalisasi.
Infrastructure	Infrastruktur dasar dan logistik	Terbatas di wilayah pedalaman; logistik sipil tidak optimal; wilayah rentan terputus dari pusat	3	Akses infrastruktur tidak merata; memengaruhi efektivitas respons militer dan bantuan kemanusiaan.
Information (PMESII)	Akses terhadap pendidikan dan informasi publik	Minim akses informasi netral; penetrasi narasi militan dan pro-pemerintah dominan	3	Ketidakseimbangan informasi memperburuk pemahaman publik terhadap krisis.

Secara umum, dinamika krisis yang terjadi di Burkina Faso menunjukkan bahwa faktor militer, sosial, dan informasi merupakan aspek paling dominan yang memengaruhi stabilitas nasional, di tengah meluasnya pengaruh kelompok ekstremis dan lemahnya pengendalian negara atas wilayahnya. Sementara itu, aspek ekonomi dan politik berada dalam kondisi yang sangat rentan akibat rendahnya legitimasi pemerintahan militer serta tingginya ketergantungan terhadap kekuatan asing, khususnya Rusia. Dalam konteks tersebut, munculnya tatanan keamanan baru melalui aliansi regional dan keterlibatan aktor luar menjadi fenomena strategis yang penting untuk dianalisis secara mendalam, khususnya dalam kerangka komparatif terhadap respons yang dilakukan oleh negara lain, termasuk Indonesia, yang juga menghadapi tantangan serupa dalam menjaga stabilitas dan ketahanan nasional.

Adanya bagian pembobotan yang tampak kosong, seperti pada entri “Military” dan “Economic” dalam baris PMESII, bukan disebabkan oleh ketidakterkaitan, melainkan karena kedua aspek tersebut telah dianalisis secara substansi dan diberikan pembobotan sebelumnya dalam dimensi DIME. Dalam matriks DIME-PMESII, memang terdapat elemen yang bersifat tumpang tindih (overlap), di mana dimensi *Military* dalam DIME berkorespondensi langsung dengan *Military* dalam PMESII, begitu pula *Economy* dengan *Economic*. Oleh karena itu, untuk menghindari duplikasi analisis dan mempertahankan efisiensi struktur matriks, aspek militer dan ekonomi tidak perlu diulang pembobotannya pada PMESII apabila telah dibahas secara komprehensif pada bagian DIME. Pendekatan ini sejalan dengan praktik analisis strategis yang mengedepankan integrasi substansi tanpa redundansi.

**Tabel 2.** Integrasi DIME-PMESII dan GAB Burkina Faso

DIME	PMESII Domain	Fakta Strategis	Bobot (1-5)	GAB (Grand Assessment Brief)
Diplomacy	Political	Pembentukan <i>Alliance of Sahel States</i> bersama Mali dan Niger; menjauh dari pengaruh Barat; menjalin kemitraan strategis dengan Rusia	4	Reposisi diplomatik regional; terbuka risiko isolasi internasional dari blok demokratis global
	Information	Narasi pro-Rusia dan anti-Barat aktif melalui kampanye media dan sosial; penguatan legitimasi melalui diplomasi naratif	4	Diplomasi non-formal digunakan sebagai alat pengaruh dan konsolidasi kekuasaan
Information	Social	Pengaruh ideologi ekstremis menyebar di komunitas rentan; penggunaan informasi sebagai alat propaganda oleh kelompok bersenjata dan pemerintah militer	5	Informasi digunakan secara aktif oleh kedua kubu (militan dan negara) untuk legitimasi dan mobilisasi
	Information	Kontrol informasi oleh rezim militer; terbatasnya media bebas dan independen	3	Ketidakseimbangan akses informasi memperburuk

Military	Military	Kendali wilayah hanya 40–60%; intervensi militer asing (Rusia); tingginya serangan ekstremis; operasi kontra-terorisme massif	5	partisipasi publik dalam demokrasi Ketergantungan pada kekuatan eksternal; efektivitas militer domestik terbatas terhadap gerilyawan yang adaptif
	Infrastructure	Infrastruktur militer dan sipil minim di wilayah pedalaman; menghambat logistik dan pengendalian wilayah	3	Kurangnya infrastruktur memperburuk kemampuan negara dalam memproyeksikan kekuasaan ke daerah terpencil
Economy	Economic	Ketergantungan ekonomi terhadap bantuan luar; eksploitasi sumber daya (emas, uranium) oleh mitra asing	2	Ekonomi tidak mandiri; kerentanan terhadap eksploitasi sumber daya tanpa penguatan kapasitas domestik
	Social	Kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial-ekonomi sebagai pemicu rekrutmen ekstremis	4	Kondisi sosial ekonomi memperbesar kerentanan terhadap ideologi radikal

DIME merupakan akronim dari Diplomacy, Information, Military, dan Economy, yang digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis elemen kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan strategis. Sementara itu, PMESII adalah singkatan dari Political, Military, Economic, Social, Infrastructure, dan Information, yang digunakan untuk memahami dinamika sistemik dalam suatu negara atau wilayah konflik secara menyeluruh. Dalam kerangka ini, GAB (Grand Assessment Brief) berfungsi sebagai ringkasan strategis yang menjelaskan kondisi aktual dan dampaknya terhadap ketahanan nasional. Untuk keperluan analisis kuantitatif, masing-masing elemen dalam DIME-PMESII diberi bobot antara 1 hingga 5, dengan skala 1 menunjukkan pengaruh yang rendah dan 5 menunjukkan pengaruh yang sangat dominan terhadap stabilitas nasional. Kombinasi ketiga kerangka ini memungkinkan penilaian yang komprehensif dan objektif dalam merumuskan strategi pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan tabel analisis, dapat disimpulkan bahwa faktor dominan dalam krisis Burkina Faso terletak pada dimensi militer, sosial, dan informasi, baik dari sisi ancaman eksternal seperti serangan kelompok ekstremis bersenjata, maupun dari sisi respon negara yang didominasi pendekatan militeristik dan kontrol narasi. Keterlibatan kekuatan asing, khususnya Rusia, serta melemahnya institusi politik dan ekonomi domestik menjadikan Burkina Faso sebagai contoh penting dari negara yang mengalami pergeseran tatanan keamanan akibat tekanan internal yang kompleks dan pengaruh eksternal yang kuat. Oleh karena itu, tabel ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi pertahanan komparatif, terutama bagi Indonesia yang tengah menghadapi ancaman non-konvensional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu dan multipolar.

**Tabel 3**. GAP: Urgensi vs Kapabilitas –Burkina Faso

Aspek Strategis	Urgensi (1–5)	Kapabilitas Saat Ini (1–5)	GAP	Keterangan dan Implikasi
Keamanan Militer	5	2	3	Ancaman ekstremisme sangat tinggi; kapabilitas militer domestik terbatas, bergantung pada bantuan asing
Stabilitas Politik	5	2	3	Kudeta militer dan rendahnya legitimasi politik menciptakan ketidakpastian tata kelola
Pengelolaan Wilayah	5	2	3	Hanya 40–60% wilayah dikuasai negara; kontrol atas daerah terpencil sangat lemah
Ketahanan Sosial	4	2	2	Masyarakat rentan terhadap rekrutmen ekstremis akibat kemiskinan dan disintegrasi sosial
Infrastruktur dan Logistik	4	2	2	Terbatasnya jaringan transportasi dan komunikasi menghambat distribusi dan mobilisasi

Diplomasi dan Aliansi	3	3	0	Kapasitas membentuk aliansi regional cukup kuat ( <i>Alliance of Sahel States</i> ), meski belum solid
Kapabilitas Informasi	4	3	1	Pemerintah mampu mengendalikan narasi, tetapi kontrol media tidak seimbang
Ketahanan Ekonomi	4	2	2	Ekonomi sangat tergantung pada bantuan luar dan eksploitasi SDA oleh mitra asing

Interpretasi terhadap nilai GAP menunjukkan bahwa GAP tinggi ( $\geq 3$ ) mencerminkan ketidakseimbangan serius antara tingkat urgensi dan kemampuan aktual suatu negara, sehingga perlu dijadikan prioritas strategis untuk intervensi atau reformasi kebijakan. GAP sedang (nilai 2) menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan kapasitas atau penguatan kerja sama dalam jangka menengah, sedangkan GAP rendah ( $\leq 1$ ) masih berada dalam batas wajar dan dapat dimanfaatkan sebagai modal strategis untuk mendukung sektor lainnya. Berdasarkan analisis GAP di Burkina Faso, sektor dengan ketimpangan tertinggi berada pada dimensi militer, pengelolaan wilayah, dan stabilitas politik, yang secara kolektif menjadi sumber utama kegagalan negara dalam merespons ancaman ekstremisme secara efektif. Dalam konteks Indonesia, temuan ini dapat menjadi kerangka reflektif yang penting untuk mengevaluasi kesiapan nasional dalam menghadapi potensi eskalasi ekstremisme, baik yang bersifat domestik maupun lintas batas, serta untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang adaptif di tengah dinamika keamanan global yang semakin kompleks dan tidak menentu.

### Diskusi

Situasi yang terjadi di Burkina Faso memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam merumuskan respons strategis terhadap ancaman ekstremisme berbasis ideologi transnasional. Fenomena degradasi keamanan di kawasan Sahel tidak hanya disebabkan oleh lemahnya kapasitas militer atau pemerintahan sipil semata, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai elemen dalam suatu ekosistem yang kompleks dan adaptif—sebagaimana dijelaskan dalam **Complex Adaptive Systems Theory**. Ancaman yang tidak linier seperti kebangkitan kelompok ekstremis JNIM dan ISGS menuntut respons negara yang juga bersifat dinamis, fleksibel, dan menyeluruh. Di sinilah kerangka DIME-PMESII menjadi sangat relevan, karena memungkinkan analisis multi-dimensional terhadap kekuatan nasional dan lingkungan strategis, mulai dari aspek diplomasi, informasi, militer, ekonomi, hingga sosial dan infrastruktur.

Pembentukan aliansi baru seperti *Alliance of Sahel States* dan keterlibatan Rusia mencerminkan perubahan pola relasi strategis dari ketergantungan ke arah multipolaritas. Ini mengindikasikan pentingnya analisis skenario dan forecasting strategis berbasis pembobotan, untuk meramalkan kemungkinan pergeseran aliansi, kekuatan, dan risiko di masa depan. Bagi Indonesia, penggunaan metode ini sangat berguna dalam menyusun kebijakan berbasis data dan proyeksi, agar tidak terjebak dalam reaksi jangka pendek yang tidak berkelanjutan.

Namun demikian, sebagaimana digarisbawahi oleh National Resilience Theory, pendekatan yang hanya menitikberatkan pada sektor militer tidak akan cukup jika tidak disertai dengan penguatan ketahanan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, ketimpangan kapabilitas yang terungkap melalui analisis GAP (terutama dalam aspek stabilitas politik dan pengelolaan wilayah) harus ditangani melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk penguatan peran masyarakat sipil. Di sinilah **Human Security Theory** memberikan kerangka nilai yang penting bahwa keamanan sejati tidak hanya berarti bebas dari ancaman fisik, tetapi juga meliputi jaminan kesejahteraan, keadilan sosial, dan pembangunan manusia yang inklusif.

Dengan demikian, studi kasus Burkina Faso mengajarkan bahwa Indonesia harus mengadopsi pendekatan strategis yang komprehensif dan adaptif terhadap potensi ancaman serupa. Penggunaan kerangka DIME-PMESII, pemanfaatan forecasting berbasis pembobotan, serta integrasi antara ketahanan nasional dan keamanan manusia menjadi landasan yang tidak hanya teoritis tetapi juga sangat aplikatif dalam perencanaan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional.

### KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketimpangan antara tingkat urgensi ancaman ekstremisme dan kapasitas respons nasional di Burkina Faso khususnya dalam aspek militer, stabilitas politik, dan penguasaan wilayah merupakan faktor utama melemahnya kontrol negara terhadap sistem

keamanannya sendiri. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola tekanan internal ini diperburuk oleh keterlibatan aktor eksternal seperti Rusia, yang memanfaatkan kekosongan pengaruh Barat dengan menawarkan bantuan militer dan politik tanpa prasyarat ideologis. Fenomena ini telah mendorong terbentuknya sistem aliansi regional baru seperti *Alliance of Sahel States*, yang menjadi penanda bergesernya tatanan keamanan kawasan menuju model multipolar. Kondisi ini selaras dengan Complex Adaptive Systems Theory, yang menekankan bahwa sistem negara menghadapi dinamika ancaman yang saling berinteraksi secara tidak linier, sehingga memerlukan pendekatan yang adaptif dan holistik dalam meresponsnya. Dalam konteks tersebut, penerapan kerangka DIME-PMESII secara kuantitatif mampu mengurai komponen kekuatan nasional dan dinamika lingkungan strategis secara multidimensional. Hasil pembobotan menunjukkan bahwa dimensi militer, sosial, dan informasi merupakan elemen paling dominan dalam membentuk respons Burkina Faso terhadap ekstremisme, sementara dimensi politik dan ekonomi justru menunjukkan kerentanan tinggi. Temuan ini memperkuat pentingnya integrasi analisis DIME yang menilai instrumen kekuatan negara (diplomasi, informasi, militer, ekonomi) dengan PMESII yang merepresentasikan struktur sistemik yang terdampak. Kombinasi keduanya, jika dikembangkan dengan metode forecasting strategis berbasis pembobotan, dapat menjadi alat bantu prediktif untuk menyusun kebijakan keamanan jangka panjang yang lebih presisi dan berorientasi antisipatif, bukan sekadar reaktif. Bagi Indonesia, temuan ini memiliki implikasi strategis yang signifikan, terutama dalam menghadapi potensi radikalisme dan ekstremisme di wilayah perbatasan dan daerah rawan seperti Poso, Papua, serta beberapa kantong ideologi transnasional lainnya. Mengacu pada National Resilience Theory, respons yang efektif terhadap ancaman semacam itu tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi harus diperkuat melalui stabilitas politik, ketahanan sosial, dan kemandirian ekonomi domestik. Ketidakseimbangan seperti yang terjadi di Burkina Faso perlu dihindari melalui pembentukan sistem deteksi dini, peningkatan kapabilitas pengelolaan wilayah, dan penguatan kapasitas sipil-militer secara terpadu. Strategi ini sejalan dengan konsep resiliensi nasional yang berbasis interdependensi sektor dan respons adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Selain itu, studi kasus Burkina Faso menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu berorientasi militer tanpa memperhatikan faktor sosial dan kesejahteraan masyarakat rentan gagal mengatasi akar permasalahan ekstremisme. Dalam kerangka Human Security Theory, keberhasilan suatu negara dalam mengatasi ancaman ideologis sangat ditentukan oleh sejauh mana negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar warga, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, dan partisipasi politik. Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun strategi keamanan nasional yang menempatkan manusia sebagai objek sekaligus subjek utama kebijakan. Pendekatan berbasis data dan skenario yang dikembangkan dalam penelitian ini, jika diadaptasi dengan mempertimbangkan konteks lokal, akan memperkuat daya tahan nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman non-konvensional yang bersifat kompleks dan transnasional. Penulis mengukur efektivitas jangka panjang dari pendekatan keamanan berbasis manusia dengan mengandalkan indikator pembangunan sosial-politik yang bersifat longitudinal, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), partisipasi masyarakat dalam tata kelola, akses terhadap layanan dasar, dan stabilitas pascakonflik. Efektivitas ini dibandingkan dengan wilayah yang mengandalkan pendekatan militer, yang cenderung hanya menurunkan kekerasan bersenjata secara jangka pendek tanpa menyentuh akar penyebab konflik. Secara teoritis, pendekatan ini merujuk pada konsep *Human Security* yang diperkenalkan oleh UNDP (1994), yang menekankan bahwa keamanan sejati mencakup perlindungan individu dari ancaman struktural seperti kemiskinan, penyakit, dan ketidakadilan sosial. Selain itu, *Theory of Positive Peace* oleh Johan Galtung juga mendukung argumen bahwa perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat tercapai bila struktur sosial dipenuhi oleh keadilan, kesetaraan, dan partisipasi. Penulis juga merujuk pada *Social Contract Theory* (Rousseau), yang menekankan bahwa legitimasi kekuasaan negara dalam menjaga keamanan terletak pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dengan menggunakan kerangka ini, penulis menunjukkan bahwa model keamanan berbasis manusia mampu membangun ketahanan sosial dan kepercayaan jangka panjang, sementara pendekatan militeristik cenderung menciptakan stabilitas semu yang rentan terhadap siklus kekerasan ulang.

## Referensi

- G., & Stievano, A. (2024). The Nursing Theory of Complex Adaptive Systems: A New Paradigm for Nursing. *Healthcare (Switzerland)*, 12(19), 1–11. <https://doi.org/10.3390/healthcare12191997>
- Olukayode, A. (2022). Ecowas, Democratic Governance and The Coup In Burkina Faso Fisher. *Devotion : Journal of Research and Community Service*, 3(13), 2134–2145. <https://doi.org/10.36418/dev.v3i13.268>
- Osuchukwu, C. (2025). The Alliance of Sahel States and the Future of Asante, A. G. (2021). University of Ghana

- <http://ugspace.ug.edu.gh> UNIVERSITY OF GHANA. *Effects of Social Media Use on the Academic Performance of Students of Public Tertiary Institutions in Ghana*, 10206539, 1–13.
- Ausseil, R., Gedik, R., Bednar, A., & Cowan, M. (2020). Identifying sufficient deception in military logistics. *Expert Systems with Applications*, 141, 112974. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.112974>
- Bacon, B. T., & Warner, J. (2021). *Twenty Years After 9/11: The Threat in Africa— The New Epicenter of Global Jihadi Terror*. September, 76–90.
- Barnea, A., & Meshulach, A. (2021). Forecasting for Intelligence Analysis: Scenarios to Abort Strategic Surprise. *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 34(1), 106–133. <https://doi.org/10.1080/08850607.2020.1793600>
- Cengiz, M., & Karademir, K. (2020). Why Salafi-Jihadist Terrorist Groups Pledge Allegiance to Al Qaeda or Isis. *International Journal on Criminology*, 7(2), 7–29. <https://doi.org/10.18278/ijc.7.2.3>
- Charbonneau, B. (2021). Counter-insurgency governance in the Sahel. *International Affairs*, 97(6), 1805–1823. <https://doi.org/10.1093/ia/iia182>
- Engels, B. (2022). Transition now? Another coup d'état in Burkina Faso. *Review of African Political Economy*, 49(172), 315–326. <https://doi.org/10.1080/03056244.2022.2075127>
- Fitton-brown, B. E. (2024). *Edmund Fitton-Brown, 2024, Global Jihad Threat*. September, 1–6.
- G. S., O., & O. C., S. (2024). Resurgence of Coup D'état in Africa in an Era of Mass Democratisation: A Study of Niger, Burkina Faso, and Mali Experiences. *African Journal of Law, Political Research and Administration*, 7(4), 49–62. <https://doi.org/10.52589/ajlpra-480tsbt>
- Governance, J., Margolin, D., & Zelin Editors, A. Y. (2024). *Www.Washingtoninstitute.Org*. [www.washingtoninstitute.org](http://www.washingtoninstitute.org)
- HARUNA, A. I. (2022). the Rising Trends of Violent Extremism in West Africa: a Threat To Regional Security. *Journal of International Relations Studies*, 2(2), 111–131. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2565010>
- Issaev, L. M., Korotayev, A. V., & Bobarykina, D. A. (2022). The Global Terrorist Threat in the Sahel and the Origins of Terrorism in Burkina Faso. *Vestnik RUDN. International Relations*, 22(2), 411–421. <https://doi.org/10.22363/2313-0660-2022-22-2-411-421>
- Kimhi, S., & Eshel, Y. (2019). Measuring national resilience: A new short version of the scale (NR-13). *Journal of Community Psychology*, 47(3), 517–528. <https://doi.org/10.1002/jcop.22135>
- Kipo-Sunyezi, D. D., & Lambon, P. J. (2025). Military Coups in West Africa: An Analysis of the Formation of the Alliance of Sahel. *Africa Review*, 1(aop), 1–14.
- Krause, D. (2022). How Transnational is “Transnational”? Foreign Fighter Recruitment and Transnational Operations among Affiliates of al-Qaeda and the Islamic State. *Perspectives on Terrorism*, 16(1), 23–37.
- Louw, S. (2022). Mission Civilisatrice: Thomas Sankara and the ‘Transformation of Mentalities’ in the Burkina Faso Revolution. *Politics, Religion and Ideology*, 23(1), 41–61. <https://doi.org/10.1080/21567689.2022.2061958>
- Moseley, W. G., & Ouedraogo, M. (2022). When Agronomy Flirts with Markets, Gender, and Nutrition: A Political Ecology of the New Green Revolution for Africa and Women’s Food Security in Burkina Faso. *African Studies Review*, 65(1), 41–65. <https://doi.org/10.1017/asr.2021.74>
- Notarnicola, I., Lommi, M., Ivziku, D., Carrodano, S., Rocco, West African Regional Integration. *SSRN Electronic Journal*, 13(April), 27–38. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5283877>
- Safoa, S. (2020). *THE THREAT OF CROSS-BORDER TERRORISM IN WEST AFRICA : A CASE STUDY OF BURKINA FASO*. BY.
- Sharpe, J., Trichas, M., & Terrill, D. (2025). Culture: a sixth domain and the introduction of the ‘C6ISRT’ framework. *Defence Studies*, 25(1), 22–46. <https://doi.org/10.1080/14702436.2024.2397520>
- Svetlana Bokeriya, T. K. (2023). *Between promise and peril : African security in the 21st century*.
- Vohito, S. (2021). Regulation and Implementation of Party Funding in Burkina Faso and Ghana: A Comparative Study. *Southern African Public Law*, 36(1), 1–18. <https://doi.org/10.25159/2522-6800/8371>